



Filsafat Kebudayaan Perspektif Abdurrahman Wahid

Moch Sukri¹, Kusen²

¹²Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

email: ¹moch.sukri16 @mhs.uinjkt.ac.id, ²kusen.kusen@uinjkt.ac.id

Abstrak:

Filsafat politik merupakan cara melihat politik dari segi filsafat, hal ini merujuk pada Penelitian ini membahas mengenai pemikiran kebudayaan di Indonesia yang menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji. Pasalnya, kehidupan masyarakat di Indonesia memiliki keterkaitan dengan persoalan pembentukan suatu kebudayaan dan menjadi faktor-faktor pemikiran yang membawa Abdurrahman Wahid berjuang mengenai negara dalam memperlakukan kebudayaan. Hal ini, Abdurrahman Wahid mengangkat 3 permasalahan. Pertama, Kebudayaan, Kedua, peranan Abdurrahman Wahid dalam menggerakkan masyarakat di Indonesia mengenai kebudayaan. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi sebab kebudayaan menjadi bagian pemerintahan di Indonesia. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan (Library Research). Buku utama yang menjadi rujukan dari penulis skripsi ini adalah Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid, dan juga buku-buku ataupun literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kebudayaan yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid memang terinspirasi dari kondisi ketertindasan atas nasib masyarakat dalam mengkreaitivitas dan melestarikan kebudayaannya. Maka hal ini Abdurrahman Wahid mempelajari pemahaman melalui nilai-nilai lubur kebudayaan.

Kata Kunci: Gus Dur, Negara dan Kebudayaan, Filsafat Kebudayaan

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, karena kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas.¹ Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen dalam artian “aneka ragam”.²

Kebudayaan secara umum menganalisis dan mengakui bagaimana kebudayaan dibentuk sebagian oleh kekuasaan politik. Pada masa rezim Soeharto, kebudayaan disandingkan sebagai otoritas politik dalam penekanan untuk menghindari suatu konflik dan kepentingan kekuasaan ritualistik dan relasi hierarkis.³

Kebijakan otoritas politik pada masa rezim Soeharto memperkuat kepentingan hierarki politik dan menumbangkan kekuasaan politik yang berfokus secara eksplisit pada konseptualisasi negara tentang kebudayaan. Tak hanya itu, banyak para ahli antropologi budaya tentang Indonesia mengakui hubungan tersebut. Menurut Philip Kitley dalam bukunya Tod Jones “*Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*” mengemukakan bahwa “proyek kebudayaan nasional” adalah pusat dari pencipta dan pembuatan regulasi untuk pertelevisian di Indonesia.⁴ Sedangkan menurut Krishna Sen, kebudayaan di bawah Orde baru mempengaruhi kuat sistem regulasi terhadap dunia seniman, khususnya terkait representasi bangsa dalam film.⁵

Kebudayaan selalu memperoleh kekuatan tanpa memperhatikan relasi kekuasaan yang membentuk penggunaannya, beragam cara yang digunakannya, dan cara-cara bagaimana kebudayaan berubah dalam konteks yang berbeda. Mark Berger dalam bukunya Tod Jones “*Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*” mendefinisikan pendekatan negara-masyarakat liberal terhadap politik di Indonesia sebagai revisi dari teori modernisasi yang berakar pada tahun 1950-1960. Menurut Mark Berger, untuk melakukan pendekatan tersebut adalah menggunakan konsep patromonialisme. Dengan menggunakan konsep tersebut

¹ Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Proble- matik Filsafat Kebudayaan* (Jakarta: Grasindo, 2000), 45.

² Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Proble- matik Filsafat Kebudayaan*, 45.

³ Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 4.

⁴ Philip Kitley. *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca: Television, Nation, and Culture in Indonesia*, Penerjemah Bambang agung, Dkk (Jakarta: Institut Sudi Arus Informasi, 2003), 3-4.

⁵ Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 5.

mengacu pada hubungan⁶ patron-klien⁷ yang struktur secara vertikal di Indonesia di mana sumber-sumber daya kemudian disalurkan kepada para “klien” dalam bersaing untuk mendapatkan keuntungan oleh penguasa.⁸

Kebudayaan adalah suatu keunggulan dan modal membangun bangsa Indonesia yang multikultural, karena memiliki gambaran budaya yang lengkap dan bervariasi. Bahkan kebudayaan diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*”. Selo Soemardjan mengatakan, saat menyiapkan Pancasila para pemimpin mengetahui bahwa kebudayaan Republik Indonesia masing-masing memiliki wadah pada suatu suku.⁹

Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan karya manusia yang meliputi segala manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur, dan bersifat rohani seperti agama, kesenian, filsafat, ilmu pengetahuan, dan tata negara.¹⁰ Selain itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dengan cara belajar.¹¹

Pada tahun 1948 di Magelang, Jawa Tengah, tercatat Departemen Pengajaran (sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengadakan kongres pertama setelah terbentuknya Republik Indonesia. Dalam hasil kongres, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kebudayaan adalah kehidupan manusia yang bermasyarakat, baik berbentuk lahir maupun batin¹². Kongres ini merupakan peristiwa penting bagi Indonesia untuk membangun negara dalam bidang kebudayaan. Suatu kongres pada dasarnya adalah institusi untuk mengambil keputusan untuk menentukan arah yang harus ditempuh dan keputusan-keputusan operasional yang harus diambil untuk

⁶ Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi*, 5.

⁷ patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental dimana seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang dianggapnya lebih rendah (klien). Fatwa Nurul Hakim, “Pola Patron-klien Pedagang Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan” *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.40 No.1 (2016), 73.

⁸ Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 7.

⁹ Mahdayeni. “Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.7 No.2 (2019), 159.

¹⁰ I.C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), 9-10.

¹¹ Kuntjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan*, (Jakarta: Djambatan, 1990), 180.

¹² Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan: 1918-2003*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Ombak, 2007), 142.

tercapainya tujuan.¹³ Tak hanya itu, kongres juga membahas terkait definisi kebudayaan, hubungan antara kebudayaan dan negara, sampai dengan menata aspek kebudayaan Indonesia mengenai tindakan terhadap lembaga pranata kebudayaan warisan zaman kolonial apakah harus dipertahankan atau diganti dengan yang baru. Selain itu, kongres membahas terkait pengelolaan sistem pelatihan dan pengajaran kebudayaan.¹⁴

Hasil yang diperoleh melalui kongres, Abdurrahman Wahid berpendapat kebudayaan tidak menjadikan sebagai tatanan negara otoritas politik. Budaya bukan semata-mata sebagai warisan melainkan kebudayaan adalah seni hidup "the art of living" yang mengatur kelangsungan hidup manusia serta menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial.¹⁵ Oleh karenanya, kebudayaan adalah tradisi dan adat istiadat yang menjadi nilai penting untuk dipertahankan.¹⁶

Abdurrahman Wahid berpendapat, kebudayaan tidak seharusnya menjadi *political gimmick*. Kebudayaan tidak semata-mata untuk ditafsirkan secara sepihak dan memberikan tekanan kepada kesenian, kesusastraan, bahasa dan lain sebagainya sebagai karya estetika dan etika belaka.¹⁷

Kebudayaan adalah merupakan hasil interaksi kehidupan manusia secara bersama. Manusia adalah anggota masyarakat yang menjalani perubahan-perubahan. Suatu perubahan yang pasti gelombang naik turunnya kebudayaan pada masyarakat akan gerakan konjungsi, oleh karenanya masyarakat adalah dinamika kebudayaan. Untuk memproses perkembangan atas kebudayaan memiliki suatu peradaban masyarakat untuk meningkatkan kemajuan.¹⁸

Hakikat kebudayaan tidak bisa lepas dari filsafat budaya, yang mana memiliki tanggungjawab mengenai budi pekerti serta memfokuskan kebudayaan pada perkembangannya. Hal ini berdasarkan pada kriteria dan prinsip-prinsip harkat dan martabat manusia. selain itu, filsafat kebudayaan juga hampir mencapai pada akar kebudayaan sebagai sifat dasar manusia dalam mengatasi ruang dan waktu empiris, sejarah dan setempat.¹⁹

Kebudayaan adalah suatu pengetahuan untuk memahami konsep ide dan gagasannya mengenai kehidupan manusia dalam berbudaya. Hal ini kebudayaan

¹³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), 1

¹⁴ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan: 1918-2003*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Ombak, 2007), 135-136.

¹⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), 1.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 1.

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 2.

¹⁸ H. Muhammad Bahar Akkase Teng, "Filsafat Kebudayaan dan Sastra: dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 5. No 1. (2017), 69

¹⁹ J.W.M. Baker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 11-13

memiliki perwujudan untuk memperoleh suatu ciptaan manusia dalam memperlakukan manusia seperti perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain sebagainya.

Problematika kebudayaan bisa mempengaruhi bagi para ahli pemikir pendidikan untuk menghadapi persoalan masalah. Sebab, persoalan kebudayaan selalu menampakkan diri sebagai faktor yang tidak dapat dielakkan, al hasil usaha-usaha yang harus diperhatikan agar tidak gagal adalah menjunjung perkembangan masyarakat.²⁰ Masyarakat tidak akan menolak akan adanya fenomena kebudayaan, karena sesuatu yang khas bagi manusia, hewan, serta tumbuhan tidak dianggap sebagai karya budaya.²¹

Pemikiran Abdurrahman Wahid memberikan suatu wawasan bagaimana kebudayaan memberikan dampak baik kepada masyarakat. Maka penulis mencoba melakukan kajian mengenai filsafat kebudayaan Abdurrahman Wahid dalam menanggapi kebudayaan dan mempersatukan kedaulatan negara. Oleh karena itu, penulis memilih "*Filsafat Kebudayaan Perspektif Abdurrahman Wahid*".

Pembahasan

Kebudayaan merupakan suatu landasan yang digunakan Gus Dur dalam menanggapi persoalan negara. Kebudayaan mengajarkan kepada inti-inti kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Bagi Gus Dur, kebudayaan adalah seni hidup "*the art of living*" yang mengatur kelangsungan hidup dan menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial, sehingga mengenai tradisi dan adat istiadat akan menjadi nilai yang pantas untuk dipertahankan.²²

Pemikiran Gus Dur dalam kebudayaan identik dengan kritikan-kritikan terhadap negara. Kritikan tersebut mencoba untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan pemerintahan. menurutnya, kebudayaan tidak seharusnya dikatakan sebagai kebudayaan negara, namun kebudayaan adalah suatu masyarakat yang hidup berintraksi sosial antara manusia dan kelompok.²³

Hubungan negara dan kebudayaan dalam pandangan Gus Dur memang menjadi acuan untuk kebebasan masyarakat tanpa adanya kebijakan dari negara. pasalnya, kebudayaan yang dilakukan oleh negara justru dijadikan sebagai konsentrasi pemilikan alat-alat produksi di luar kontrol masyarakat, sehingga eksploitasi sumber daya alam akan tidak terhitung kelestarian lingkungannya.²⁴

²⁰ J.W.M. Baker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, 11

²¹ J.W.M. Baker SJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, 14.

²² Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 1

²³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 1.

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 3.

Menurut Gus Dur, kultur seharusnya menjadi tugas utama masyarakat untuk mempekuat masyarakat secara keseluruhan dan tidak untuk memperkuat negara.²⁵

Kebudayaan Perspektif Abdurrahman Wahid

Manusia dan kebudayaan merupakan sesuatu yang menyusun kehidupan bersama-sama. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya sehingga terbentuk masyarakat. Proses manusia dilakukan melalui melahirkan, menciptakan, menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan. sebab, tidak ada manusia tanpa kebudayaan, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa manusia. kebudayaan merupakan suatu interaksi kehidupan bersama. Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan baik kongjungsi maupun perubahan naik turunnya gelombang kebudayaan atau disebut “dinamika kebudayaan”.²⁶

Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid, kebudayaan sebenarnya mencoba untuk mengenal apa yang sedang terjadi di berbagai bidang yang berhubungan dengan inti-inti kebudayaan, yakni *human social life*.²⁷ *Human social life* adalah tindakan yang diperoleh masyarakat yakni ekonomi, politik, dan negara. Menurut Abdurrahman Wahid, dari kegiatan dan pranata kelembagaan yang berhubungan dengan menghasilkan dan mendistribukan ketiga pokok dasar merupakan bagian dari kebudayaan.²⁸ Namun, kebudayaan justru disalahgunakan oleh pemilik modal alat-alat produksi untuk melakukan diluar kontrol masyarakat dalam menghasilkan dan mendistribusikan secara keseluruhan. Pasalnya, eksploitasi dalam sumber daya alam untuk kelestarian lingkungan dalam penghasilan tiga kebutuhan dasar yakni ekonomi, politik, dan negara justru merusak inti kebudayaan.²⁹

Menurut Abdurrahman Wahid, kebudayaan bukanlah tercipta pada suatu sistem politik-ekonomi yang mengakibatkan deforestasi. Tetapi untuk mengatasi suatu cacat perubahan dalam tempo yang tidak boleh terlalu lama sehingga kelestarian hidup masih menjadi tanggungan.³⁰

Dalam mencapai pemahaman mengenai kebudayaan, Abdurrahman Wahid memberikan suatu pola perilaku sosial dan individual manusia di suatu kawasan, di mana suatu proses aktif untuk merumuskan kehidupan suatu kelompok manusia dan merujuk pada pengembangan pemikiran, sikap, kesadaran, dan pandangan terhadap masyarakat. Hal ini jelas kebudayaan tidak meliputi

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 6.

²⁶ H. Muhammad Bahar Akkase Teng. “Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah)” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.5, No.1 (2017) , 71.

²⁷ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 3.

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 3.

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 3

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 5.

keseluruhan teknologi, perekonomian, dan pertanian untuk kehidupan masyarakat.³¹ Kebudayaan bisa diartikan sebagai keseluruhan produk seni dan sastra sehingga dihasilkan melalui proses berpikir dan pemikiran, refleksi dan pendalaman masalah, serta rekonstruksi atau proyeksi kehidupan masyarakat terhadap masa lampau hingga masa yang akan datang.

Kebudayaan dalam perspektif Abdurrahman Wahid merupakan suatu aksi rasional yang saling terhubung dalam suatu keterpaduan untuk memahami, mengubah, dan mempertahankan kebudayaan demi kehidupan sosial yang manusiawi. Menurutnya, kebudayaan adalah milik yang sah oleh masyarakat dan bukan milik negara. Kebudayaan tidak dimiliki oleh kekuasaan, akan tetapi kebudayaan lahir dalam suatu interaksi antar pribadi-pribadi, dan kelompok-kelompok untuk menjamin kemerdekaan setiap peserta kebudayaan.³²

Untuk melestarikan kebudayaan dan mencegah pemadegan perkembangan Indonesia, Abdurrahman Wahid memberikan suatu penjelasan bahwa sebagai masyarakat harus menjadi tugas utama untuk memperkuat kebudayaan secara keseluruhan dan tidak memperkuat negara.³³ Hal ini dikarenakan masyarakat bisa melakukan suatu ekspresi dan kreativitas tanpa adanya desentralisasi kebudayaan, sehingga terbentuknya seni kehidupan. Namun, apabila kebudayaan membentuk untuk menguatkan negara, masyarakat justru akan kesulitan dalam mengembangkan budaya dan dibatasi oleh birokrasi.

Kehidupan masyarakat harus mengembangkan kreativitas yang sesuai dengan kedudukan *khalifatullah fil ard*³⁴ yang bertugas dalam mensejahterakan kehidupan. tugas tersebut memerlukan kreativitas yang tinggi dan manusia telah diberikan kekuatan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat memberikan jaminan dalam pengembangan kreativitas secara tuntas.³⁵ Menurut Koentjaraningrat mengartikan bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar.³⁶

Dalam mengembangkan kreativitas budaya sangat memerlukan kebebasan berpendapat dan kelonggaran ekspresi antara para budayawan. Melalui kebebasan tersebut akan muncul suatu kreativitas tanpa ada pengaruh oleh tekanan negara. Sebab, budaya yang dipengaruhi oleh negara justru akan memperlambat

³¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 153.

³² Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 3-6.

³³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 6.

³⁴ *khalifatullah fil ard* diambil dari surat al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi :aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 158.

³⁶ Koentjaraningrat, seperti yang dikutip <http://komunitas-nuun.blogspot.com>

kemajuan kebudayaan. Gus Dur mengatakan bahwa melalui kebebasan pendapat akan mengasah pemikiran dan memperbaharui wawasan secara terus-menerus.³⁷

Kebebasan pendapat atau kelonggaran sangat lah penting dalam mendiskusikan suatu karya dan ekspresi bagi masyarakat. Memberikan leluasa dan mengarahkan kebudayaan menjadi struktur, sehingga kebudayaan dapat dikembangkan secara menyeluruh. Pengembangan budaya terhadap masyarakat memang harus diletakan kepada pertumbuhan sifat-sifat manusiawi. Karena manusia adalah satu-satunya tolak-ukur dalam membentuk suatu kegiatan budaya. Nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan kemunduran dalam kehidupan masyarakat harus dihilangkan.³⁸

Hakikat Kebudayaan

Abdurrahman Wahid terhadap kebudayaan pada hakikatnya adalah suatu yang pluralistik di mana Indonesia mempunyai geografis, etnis, agama, dan bahasa yang sangat luas. Namun, hanya sebuah masyarakat kecil yang dapat berkembang tanpa memiliki pluralitas budaya sama sekali, seperti pada masyarakat suku-suku terpencil yang tidak mampu mengembangkan pola hidup. Dari titik tolak yang sudah jelas bahwa pengembangan pada pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya. Akan tetapi, pada hakikat perkembangannya kebudayaan semenjak sejarah umat manusia senantiasa dilupakan.³⁹

Apabila pluralitas merupakan hakikat dari perkembangan sebuah kebudayaan dalam arti geografis, maka hal yang sama juga menjadi semakin mutlak dimiliki oleh entitas budaya yang berlingkup jauh lebih luas, seperti kebudayaan sebuah bangsa. Tak hanya itu, apabila jangkauan entitas yang bernama bangsa bisa meliputi sesuatu dengan pluralitas geografis, etnis, agama, dan bahasa yang sangat tinggi, al hasil sistem pemerintahan memiliki derajat yang lebih tinggi (seperti pemerintah federal atau konfederal), dan sistem perekonomian untuk berkembang menjadi sulit. Maka tuntutan untuk menciptakan pada pengembangan masyarakat pluralistik, pada dasarnya adalah tuntutan akan sebuah kebijaksanaan pengembangan desentralisasi kebudayaan.⁴⁰

Kebudayaan yang desentralisasikan memang sulit untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun dengan adanya birokrasi yang canggih dan mapan, justru kebudayaan tidak akan seimbang antara kegiatan masyarakat dan dukungan program pemerintah. Menurut Abdurrahman Wahid, untuk mencapai kebudayaan yang kolektivitas harus didasarkan oleh metabolisme biologis,

³⁷ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 158.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 159.

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 9.

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 10.

kebutuhan psikologis, dan kecanggihan pemikiran, sehingga kebudayaan⁴¹ menjadi sebuah “*infinitif*”.⁴²

Bagi Abdurrahman Wahid, *Infinitif* adalah sebuah budaya masyarakat, di mana ketinggian derajat pluralitas mengharuskan untuk mendorong peluang yang sama bagi semua warga negara yang merasa berkepentingan dengan perkembangan budaya untuk memulai prakarsa separtial dalam perkembangan budaya. Oleh karenanya, dengan menggunakan prinsip ini tidak ada pilihan lain bagi masyarakat kecuali memperlakukan proses desentralisasi kebudayaan.⁴³

Apabila dengan adanya memperlakukan kebudayaan yang disentralisasikan benar, maka negara ini telah memiliki pola pengembangan budaya yang terdesentralisasikan. Namun, dalam kenyataannya, perkembangan yang terjadi saat ini tidak demikian. Pasalnya, dalam permasalahan kebudayaan ini selalu menjadi persimpangan jalan antara hakikat kebudayaan yang terjadi dimanmana. Bahkan untuk membicarakan mengenai desentralisasi seakan sia-sia bagi masyarakat dikarenakan komputerisasi hidup manusia justru mendorong berkembangnya pola kehidupan yang diseragamkan lebih jauh.⁴⁴

Oleh karenanya, kebudayaan merupakan suatu entitas darajat tertinggi yang mengharuskan masyarakat untuk terus mendorong peluang mengenai perkembangan budaya. Karena pada dasarnya, pelestarian kebudayaan sebuah bangsa tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya desentralisasi kebudayaan.⁴⁵ Tak hanya itu, Abdurrahman Wahid pun memaparkan bahwa dengan adanya desentralisasi kebudayaan, maka masyarakat dalam membentuk dan proses kreativitas akan sangat beresiko. Apalagi desentralisasi memiliki biroraksi yang arogan dan kurangnya kesadaran terhadap masyarakat, sehingga birokrasi tersebut kurang bertanggung jawab, memilah proses kreativitas, dan menyempitkan kegiatan kebudayaannya.⁴⁶

Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Kebudayaan adalah sesuatu yang mencakup dari segala inti-inti kehidupan suatu masyarakat. Di mana kebudayaan adalah kehidupan sosial manusiawi “*Human social life*” dan membutuhkan alam untuk memenuhi kebutuhan dasar manusiawi. Hal ini bila manusia melestarikan alam yang bisa mencapai tujuan distorsi, maka keutuhan suatu kebudayaan berada

⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 11.

⁴² *Infinitif* adalah suatu pengalaman lahir dan batin seluruh warga masyarakat. Bahkan akan menjadi semakin nyata dalam situasi interaksi budaya dengan kelompok masyarakat lain. Dan juga, berlangsung secara intensif seperti dalam era globalisasi dalam arti yang paling luas dan paling sederhana.. Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 11.

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 11.

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 10.

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 11.

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 12.

dalam suatu krisis yang sesungguhnya, karena melalui pendidikan lingkungan hidup adalah sesuatu yang secara sah berurusan dengan kebudayaan.⁴⁷

Menurut Gus Dur, apabila pendidikan adalah sesuatu yang alami, maka seluruh teknik produksi dan jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar akan pengetahuan seperti lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi adalah kebudayaan.⁴⁸ Namun apabila pendidikan di mana semua universitas sudah diturunkan derajatnya menjadi bagian dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “partikular” adalah peristiwa a-kultural yang mengikis habis daya cipta suatu pendidikan tinggi yang semata-mata berfungsi sebagai mesin untuk melaksanakan kebijakan negara, maka jarak pengetahuan “*knowledge distancing*” akan berakhir pada jarak politik “*political distancing*”.⁴⁹

Memang mengenai kondisi kehidupan seakan-akan telah menghukum mati terhadap perkembangan kebudayaan dalam segenap bidang kehidupan. Bahkan, kehidupan beragama pun sesuatu yang bersifat pribadi (sebagai hubungan batin antara makhluk dan penciptanya), ternyata dianggap sebagai uniformisasi yang wajar.⁵⁰

Kebudayaan sebenarnya telah dikuasai oleh negara sepenuhnya. Negara menganggap kebudayaan sebagai alat produksi untuk menciptakan suatu penghasilan dan distribusi yang disalahgunakan. Tidak dipungkiri, dalam pandangan Abdurrahman Wahid, suatu demokrasi kini tidak memiliki keseimbangan antara kekuatan negara dan kebudayaan. Sebab tanpa adanya keseimbangan maka atribut apapun yang diberikan oleh negara tidak akan tercipta. Maka, dengan adanya demokrasi pun masih memiliki masalah kultural yang dipantas menjadi *public discourse*.⁵¹

Bagi Abdurrahman Wahid, masyarakat manapun dalam sejarah selalu melakukan uniformisasi atas perkembangan kebudayaan sendiri dalam upaya menyelesaikan pemandekan budaya, sehingga pemandekan menjadi suatu hukum alam yang harus diselesaikan. Menurutnya, hukum alam merupakan sebuah siklus alam yang tidak bisa terelakan, sebab masyarakat tidak akan lepas pada siklus “masyarakat lahir, tumbuh, berkembang, dan layu”.⁵²

Upaya Gus Dur dalam melestarikan budaya memang sangat antusias pada perkembangan terhadap masyarakat. Hal ini karena, masyarakat bisa mengembangkan budaya melalui kreativitas agar tidak terhambat hanya kepada proses budaya itu saja. Jika masyarakat tertanam pada negara, maka kreativitas kebudayaan akan sulit untuk dicapai. Kebudayaan yang dikuasai oleh negara dan

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 2

⁴⁸ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 3

⁴⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 4-5

⁵⁰ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 10.

⁵¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 5-6

⁵² Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 9.

dijadikan sebagai alat-alat produksi, maka siklus kebudayaan akan terhambat atas perkembangannya.

Dalam memahami perbedaan dan mempertentangkan antara negara dan kebudayaan, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa kultur seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan tidak menjadi wewenang negara untuk diletakan di atas pundak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. masyarakat seharusnya mengambil kultur sebagai daya perekat, sedangkan negara mengambil kekuasaan sebagai daya perekat. Dalam hubungan mengenai kebudayaan memang terlalu besar, terlalu penting, dan terlalu hakiki untuk dimiliki oleh masyarakat untuk diberikan penyesuaiannya serta diberikan beban tanggung jawab untuk hanya dipikul oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁵³

kebudayaan tidak berdiri sendiri di atas kekuasaan, kebudayaan lahir di dalam interaksi antar pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok untuk menjamin kemerdekaan. Tak hanya itu, kebudayaan tidak lahir dari suatu “kongres” melainkan kebudayaan lahir dan tumbuh di dalam *human culture interaction*. Oleh karenanya, kebudayaan yang dianggap sebagai suatu “kongres” tidak akan menghasilkan suatu kebudayaan yang kekal.⁵⁴

Kebudayaan adalah suatu hal yang terus berlangsung dan belum berhenti pada titik tertentu. Ketika suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia telah berhenti di satu titik dan tidak berkembang lagi, maka hal itu, disebut peradaban.⁵⁵ Kehidupan manusia yang berkereasi merupakan suatu kelangsungan hidup manusia. Semua makhluk hidup mempengaruhi lingkungannya dan seolah-olah meninggalkan suatu bekas padanya. Bekas telapak kaki, lubang di dalam tanah, sarang, itu semuanya menceritakan mengenai binatang macam apakah yang bersarang di sana. Tetapi bekas yang tinggalkan manusia masih lebih luas dan lebih mendalam, intensif ia mengolah lingkungannya.

Menurut Gus Dur, untuk menyediakan peluang dan menampilkan ekspresi budaya harus dikaitkan dengan kebutuhan dasar melalui pencaharian jati diri. sebab identitas budaya dari kehidupan masyarakat yang sedang mengalami masa transisi multisektural yang sangat luas dan intensif harus mengambil keputusan untuk meraih perkembangan seperti teknologi canggih hingga penanganan terhadap keagungan budaya asmat di Irian Jaya.⁵⁶ Dalam proses perkembangannya, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai pemilikinya sehingga kemajuan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cermin dari kemajuan peradaban masyarakat.

⁵³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 6

⁵⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 7

⁵⁵ H. Muhammad Bahar Akkase Teng. “Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah)” *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.5, No.1 (2017), 68.

⁵⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 12.

Jika melihat kebudayaan 50 tahun yang lalu, budaya lama dengan budaya modern masih menjadi polemik. Menurut Sutan Takdir Alisjahbana mengungkapkan bahwa budaya lama justru menolak dengan adanya budaya modern dan masih tetap mengagung-agungkan masa lampau seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram.⁵⁷ Polemik ini tidak ada satu pun yang mencoba untuk melakukan suatu perubahan substansi dan memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Untuk menciptakan suatu kesadaran masyarakat mengenai budaya mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Kebebasan berpendapat dan ketundukan kepada hukum adalah inti dari keadilan yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru. Prioritas tersebut didasari dengan prioritas transformasi budaya-budaya yang telah ada seperti penerbitan kehidupan koperasi dan budaya politik. Budaya politik apabila dilihat dari orang Jawa yang pasif “menunggu *dawuh*⁵⁸ dari atas” harus diubah menjadi budaya kreatif yang serba berinisiatif.⁵⁹

Nilai-Nilai Kebudayaan

Nilai merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi pemikiran, tindakan dan ciptaan manusia. seperti halnya Pemikiran Gus Dur untuk lebih mengenal nilai-nilai kebudayaan. Gus Dur mengenai nilai-nilai kebudayaan, berpedoman kepada nilai-nilai leluhur. Pandangan tersebut memberikan sikap mengidealisir untuk meletakkan nilai-nilai pada kedudukan yang sangat diagungkan sebagai prinsip pengarah karena membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.⁶⁰

Prinsip-prinsip yang mengarah untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan merupakan bentuk “sikap bijaksana” seperti keserasian tanpa menghilangkan kreativitas perorangan. Tak hanya itu, prinsip yang menyediakan untuk mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain. oleh karenanya, dengan sikap yang bijaksana dalam dirinya, bangsa Indonesia menjadi bangsa pencinta perdamaian, sopan kepada orang lain tanpa sedikitpun menyerahkan diri kepada akibat-akibat koruptif dari modernisasi, usaha dalam berkarya dan memiliki akar yang dalam pada kehidupan yang kaya dengan

⁵⁷ Achdiat K.Mihardja, *Polemik Kebudayaan* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1948), 23.

⁵⁸ Dalam KBBI, *Dawuh* adalah mengapa-itu baru dikeluarkan sekarang? Atau menyuruh agar orang lain mengerjakan sesuatu.

⁵⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001), 125-126.

⁶⁰ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 26.

refleksi dan meditasi, serta sabar dan tekun dalam membangun masyarakat yang adil bagi masa depan.⁶¹

Walaupun prinsip ini bertentangan dengan penilaian kritikus-kritikus sosial seperti Adnan Buyung Nasution, Sutan Takdir Alisjahbana, Y.B. Mangunwijaya, M.A.W Brouwer dan Mahbud Djunaedi, namun semua nilai-nilai kini menjadi bahan kontemplasi paling intensif dalam penyiapan dan penyelenggaraan indoktrinasi falsafah negara Pancasila yakni penataran P4 (Pedoman, penghayatan, dan Pengamalan Pancasila).⁶²

Adapun salah satu penulis yakni Clyde Kluckhohn membahas mengenai identifikasi nilai atau orientasi kehidupan manusia “persepsi tentang penggunaan waktu, dan nasib”. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa nilai atau orientasi sangatlah tepat atas nilai-nilainya. Sebab dengan memperoleh orientasi dapat menjadi suatu objektif dalam mencari suatu kesalahan dan kemudian dianggap sebagai ilmiah.⁶³

Kemudian, apakah dengan menggunakan metode yang dilakukan oleh Clyde memberikan hal yang positif bagi pembangunan masyarakat? Atau justru nilai atau orientasi dianggap negatif karena adanya keterkaitan dengan politik?. Abdurrahman Wahid menganggap bahwa pernyataan Clyde sepakat dengan pemikirannya dikarenakan adanya keterbatasan ini akan timbul pendekatan mengenai nilai atau orientasi untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk nilai, serta karakteristiknya. Menurut Abdurrahman Wahid, melalui keterbatasan ini maka kemudian tumbuh berkembang untuk mengetahui proses para ilmuwan sosial dalam berusaha memahami hubungan antara nilai dan faktor-faktor dalam kehidupan secara koheren.⁶⁴ Oleh karenanya, masyarakat kemudian menyediakan cara untuk menyerap dan mencernakan kebutuhan yang akan perubahan untuk diberikan suatu responsi yang sehat. Karena suatu perubahan pasti akan menghadapi tantangan modernisasi.

Perubahan dalam menghadapi suatu modernisasi menurut Abdurrahman Wahid adalah memberikan suatu perhatian sebelum melangkah lebih jauh. Karena mengenai nilai-nilai kebudayaan akan disalahgunakan oleh faktor-faktor modernisasi, maka Abdurrahman Wahid memberikan dua pendekatan diantaranya “organisasi pemuda daerah” dan “gerakan Islam”. Tujuan Gus Dur memberikan dua pendekatan tersebut adalah menjelaskan bagaimana suatu perkembangan budaya dalam perspektif dua organisasi⁶⁵ di antaranya:

a. Organisasi Pemuda Daerah

⁶¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 26.

⁶² Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 26-27.

⁶³ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 29

⁶⁴ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 29-30

⁶⁵ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 31.

Organisasi pemuda daerah memiliki suatu pemahaman mengenai pengembangan “kebangsaan Modern”. bahkan memberikan dalam upaya mendidik anak-anak khususnya para bangsawan lokal dan pejabat pemerintahan dari semua daerah dan mengirimkan di berbagai kota besar di Jawa untuk merasakan kebutuhan sehingga mendirikan perkumpulan-perkumpulan daerah baik Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, dan Sumatera Selatan untuk bisa merasakan kebutuhan yang dikenal sebagai “Pemuda Sumatera”. Tujuan perkumpulan-perkumpulan tersebut adalah wadah untuk saling membantu di kala susah dan mengembangkan kebudayaannya. Tak hanya itu, organisasi tersebut mencari pembenaran mengenai bantuan keuangan dan memperoleh izin organisasi untuk membawa sesuatu dalam pandangan kehidupan masyarakat untuk membawa dunia yang lebih luas dari organisasi sebelumnya yang dibatasi oleh lokalitas orang tua.⁶⁶

Organisasi Pemuda Sumatera dalam memiliki pandangan hidup dan orientasi yang telah berubah bagi kalangan siswa-siswa, pasti akan mengalami kesulitan atau memaksakan suatu kehendak untuk melakukan pilihan antara ketundukan kepada cara hidup tradisional yang sudah tidak dapat diterima atau mengikuti pola kehidupan modern yang akan diperoleh dengan hal yang baru. Oleh karenanya, menjadi pemuda Sumatera dapat menghindari tuntutan untuk mendefinisikan rasa keterikatan kepada sebuah “dunia Minangkabau”.⁶⁷

b. Gerakan Islam

Gerakan Islam terutama Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Solo, dan Syarikat Islam dibawah naungan Haji Oemar Said Tjokroaminoto mengembangkan mengenai identitas baru dalam memperjuangkan sebuah kebangsaan bagi semua suku bangsa yang ada. Gerakan Islam tersebut adalah menggantikan kebutuhan dalam merumuskan posisi mengenai tradisionalisme agama menjadi Muslim baru. Pasalnya, sebuah pertukaran dapat disifati sebagai sebuah pembaharuan tanpa terputusnya ikatan di masa lampau.⁶⁸

Gerakan Islam pada saat itu telah berhasil mencapai solidaritas yang tidak terbatas pada sebuah daerah. Hal ini dalam penyebaran agama kepada beberapa penduduk daerah memperkenalkan penggunaan huruf Arab dalam kepenulisan bahasa lokal bagi masyarakat sehingga masyarakat yang berkembang akan merasakan suatu “kebangsaan modern” dikalangan gerakan Islam.⁶⁹

⁶⁶ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 32.

⁶⁷ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 31-32.

⁶⁸ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 33.

⁶⁹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, 31

Kesimpulan

Perkenankan penulis menyimpulkan hasil pembahasan skripsi ini; kebudayaan menurut Gus Dur adalah ketetapan untuk mencapai suatu kemajuan yang berkaitan dimasa lampau dan masa sekarang. Hal ini terdapat pemahaman bahwasanya budaya adalah suatu intraksi untuk mencapai kebahagiaan masyarakat Indonesia.

Kebudayaan dalam pemikiran Gus Dur adalah suatu komponen yang dapat menyimbangi persoalan-persoalan dalam menjalan suatu kehidupan dibawah naungan pemerintahan. Gus Dur menginginkan suatu budaya adalah mewujudkan kelestarian, kreativitas, dan dalam mencapai kesejahteraan bagi manusia agar tidak menjerumus pada ketertindasan dan teraniayaan.

Gus Dur menganggap kebudayaan merupakan suatu seni kehidupan dimana mengatur kelangsungan hidup untuk menjaga tatanan sosial. Sehingga budaya menjadi nilai yang pantas untuk dipertahankan. Kebudayaan adalah suatu aksi rasional yang sambung-menyambung dalam suatu keterpaduan untuk memahami, mengubah, dan mempertahankan kebudayaan sambil memberikan suatu kehidupan untuk menuju sosial yang manusiawi.

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh penting dalam kebudayaan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa penulis dan beberapa peneliti mengalami kesulitan dalam mencari data mengenai kebudayaan secara universal dan mencari sumber-sumber referensi primer yang membahas kebudayaan. Namun hal ini tidak dapat menghilangkan sebuah fakta menarik mengenai Gus Dur dalam memahami kebudayaan di Indonesia.

Oleh karenanya, mengenai kebudayaan yang dilakukan oleh Gus Dur adalah menghidupkan kembali proses suatu pengembangan kebudayaan bagi kehidupan masyarakat. Mengenai pemikiran Gus Dur adalah salah satu solusi bagi para filsuf untuk mencapai kebahagiaan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkase Teng, H. Muhammad Bahar. "Filsafat Kebudayaan dan Sastra: dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 5. No 1. 2017.
- Baker, J.W.MSJ. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Hakim, Fatwa Nurul. "Pola Patron-klien Pedagang Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Kesejahteraan" *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.40 No.1, 2016,
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Kitley, Philip. *Kontruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca: Television, Nation, and Culture in Indonesia*, Penerjemah Bambang agung, Dkk, Jakarta: Institut Sudi Arus Informasi, 2003.

Kuntjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan, 1990.

Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Proble- matik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Mahdayeni. “Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanegaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.7 No.2, 2019.

Mihardja, Achdiat K. *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1948.

Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan: 1918-2003*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Ombak, 2007.

Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.

Website

Koentjaraningrat, seperti yang dikutip <http://komunitas-nuun.blogspot.com>